

ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM REPRESENTASI POLITIK INDONESIA

Icha Angger Pradesa

Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Februari 2024

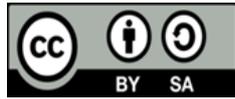
Revised Februari 2024

Accepted Februari 2024

Available online Februari 2024

Email:

icha.adiwangsa@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung.

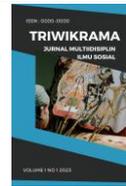
Peran perempuan dalam representasi politik Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks pembangunan demokrasi yang inklusif. Meskipun terdapat kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, namun tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan masih terjadi di berbagai tingkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam representasi politik Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan serta dampaknya terhadap pembentukan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Data dianalisis secara sistematis untuk memahami peran perempuan dalam representasi politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang perlu diatasi, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan dari partai politik, dan kendala akses terhadap sumber daya politik. Meskipun demikian, keberadaan perempuan dalam politik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

Kata Kunci: Peran perempuan, Representasi politik, Partisipasi politik, Kesetaraan gender.

ABSTRACT

The role of women in Indonesian political representation is an important concern in the context of inclusive democratic development. Even though there are policies and regulations that support gender equality, challenges in increasing women's political participation still occur at various levels. This research aims to analyze the role of women in Indonesian political representation, with a focus on the factors that influence women's political participation and their impact on policy formation. This research uses a descriptive qualitative approach by collecting data from journals, articles and books that are relevant to the research topic. Data was analyzed systematically to understand the role of women in Indonesian political representation. The research results show that although there has been an increase in women's



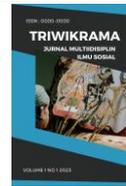
political participation in recent years, there are still obstacles that need to be overcome, such as patriarchal culture, lack of support from political parties, and obstacles to access to political resources. Nevertheless, the presence of women in politics has made a significant contribution to the formation of more inclusive and representative policies.

Keywords: *Role of women, political representation, political participation, gender equality.*

PENDAHULUAN

Kita mengetahui bahwa ada banyak karya yang membahas tentang perempuan. Isu-isu yang terkait dengan perempuan merupakan topik yang terus diperbincangkan oleh berbagai kalangan pemikir, baik dari kalangan agamawan maupun pemikir sekuler. Selama berabad-abad, mulai dari abad pertengahan hingga era modern, telah muncul berbagai teori yang beragam tentang peran perempuan dalam masyarakat. Kehadiran perempuan dalam masyarakat dianggap memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Namun, seringkali peran penting yang dimainkan oleh perempuan tidak mendapatkan perhatian yang layak, sehingga masyarakat seringkali tidak menyadari betapa pentingnya kontribusi mereka (Amareta Kristina, 2022). Akibatnya, perempuan dapat menjadi kelompok yang terpinggirkan. Dalam Islam, tidak ada ajaran yang mendukung perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Prinsip kesetaraan di dalam Islam menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal ketaqwaan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, sudut pandang yang merendahkan perempuan harus diubah. Al-Qur'an selalu menekankan pentingnya keadilan bagi keduanya, serta mencita-citakan keamanan, ketenangan, dan mengutamakan kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Pada negara Indonesia meskipun budaya patriarki masih bertahan namun secara bertahap budaya tersebut mulai tergerus oleh arus modernisasi yang semakin menguat. Terdapat banyak perempuan yang kini berani untuk menyuarakan pendapat mereka di ruang publik. Dalam kerangka hukum, hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara jelas dijamin, tanpa memandang jenis kelaminnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I (2) menetapkan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk tidak diskriminatif berdasarkan apa pun, dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif." Untuk mengimplementasikan prinsip ini, pemerintah telah merumuskannya ke dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam mandat Undang-Undang No. 7 tahun 1984, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik secara individu maupun kelompok (Budiarta, 2022).



Peran perempuan dalam representasi politik Indonesia menjadi sebuah tema yang menarik untuk dieksplorasi secara mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik, peran perempuan dalam politik semakin menjadi fokus perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keterwakilan yang adil dan signifikan bagi perempuan dalam bidang politik. Sejarah perjuangan perempuan di Indonesia telah diwarnai dengan berbagai peristiwa penting yang menandai perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak politik yang sama dengan kaum pria. Dari masa kolonial hingga era reformasi, perempuan telah aktif terlibat dalam berbagai gerakan untuk memperjuangkan hak-hak politik, termasuk hak memilih dan dipilih.

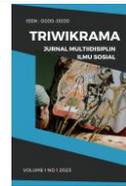
Meskipun keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah mengalami peningkatan sejak reformasi, namun angka tersebut masih belum mencapai tingkat yang memuaskan. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan di parlemen Indonesia masih jauh di bawah standar yang diharapkan, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Berbagai hambatan dan tantangan masih dihadapi oleh perempuan yang ingin terlibat aktif dalam politik. Dari stereotip gender hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, perempuan seringkali menghadapi rintangan yang tidak mudah untuk mereka Atasi (Azhari et al., 2022).

Keterwakilan perempuan dalam politik memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Media memegang peran penting dalam membentuk citra dan narasi seputar peran perempuan dalam politik. Pemberitaan yang bersifat stereotip atau bias dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan kualitas kepemimpinan perempuan di bidang politik.

Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat telah melakukan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui kebijakan afirmatif, program pelatihan, serta advokasi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Dengan memahami latar belakang serta kompleksitas tantangan yang dihadapi, penting bagi kita untuk terus mendorong peran perempuan dalam representasi politik Indonesia. Melalui langkah-langkah konkret dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan akan terwujud keterwakilan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dalam arena politik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran



perempuan dalam representasi politik Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena tersebut, memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi peran perempuan dalam politik, serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keterwakilan dan pengaruh perempuan dalam arena politik (Sugiyono, 2017). Penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif, termasuk studi literatur, analisis dokumen, serta wawancara dengan informan kunci seperti politisi, aktivis, dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu perempuan dalam politik.

Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, artikel dari media terpercaya, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Jurnal ilmiah menyediakan pemahaman yang mendalam tentang berbagai teori, konsep, dan temuan empiris terkait peran perempuan dalam politik Indonesia. Artikel dari media terpercaya memberikan perspektif aktual dan kontekstual tentang perkembangan terbaru dalam representasi politik perempuan di Indonesia. Sementara itu, buku-buku yang beragam dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai latar belakang sejarah, hambatan, tantangan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Dengan memadukan sumber data dari berbagai sumber tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan beragam tentang peran perempuan dalam representasi politik Indonesia.

Dalam menganalisis peran perempuan dalam representasi politik Indonesia, berikut beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan (Sugiyono, 2018) :

1. Analisis Konten

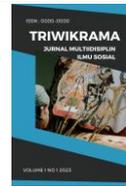
Teknik ini melibatkan penelaahan dan klasifikasi data, seperti teks dari jurnal, artikel, atau dokumen-dokumen terkait politik dan perempuan. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema yang muncul berkaitan dengan peran perempuan dalam politik, serta menganalisis pola-pola yang terdapat dalam narasi tersebut.

2. Analisis Wacana

Melalui teknik ini, peneliti akan mengkaji struktur dan makna dari teks yang berkaitan dengan representasi politik perempuan. Hal ini mencakup pengidentifikasian frasa-frasa, istilah-istilah, dan konsep-konsep yang digunakan dalam mendeskripsikan peran perempuan dalam politik, serta analisis terhadap konstruksi wacana tersebut.

3. Analisis Gender

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat peran gender yang tersirat dalam representasi politik, baik dalam teks-teks maupun dalam realitas politik sebenarnya. Penelitian gender akan memperhatikan bagaimana norma-



norma gender dan ekspektasi sosial terhadap perempuan memengaruhi persepsi dan penilaian terhadap peran politik perempuan.

4. Analisis Komparatif

Melalui teknik ini, peneliti akan membandingkan data mengenai representasi politik perempuan di Indonesia dengan negara-negara lain atau dengan situasi historis yang relevan. Hal ini dapat membantu untuk memahami konteks unik Indonesia dalam hal peran politik perempuan, serta memperoleh wawasan dari pengalaman-pengalaman yang berbeda di tempat lain.

5. Analisis Kualitatif Tematik

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dalam data, seperti hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik, upaya-upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, atau dampak dari partisipasi perempuan dalam proses politik.

Dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik analisis di atas penelitian tentang peran perempuan dalam representasi politik Indonesia dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan holistik tentang dinamika yang terlibat dalam konteks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal sejarah peradaban Islam terutama pada masa pra-Islam kedudukan kaum perempuan sangatlah memprihatinkan. Mereka seringkali diperlakukan secara rendah dan dianggap sebagai makhluk yang hina dalam masyarakat Arab. Bahkan, kelahiran seorang bayi perempuan seringkali dipandang sebagai aib bagi keluarga, yang menyebabkan praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup menjadi lumrah. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kemungkinan pernikahan anak perempuan dengan laki-laki yang memiliki status sosial rendah. Namun, dengan kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terjadi perubahan signifikan dalam tatanan masyarakat (Nurchaya & Akbarizan, 2023). Ajaran Al-Qur'an dan Hadits mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mengakibatkan perubahan positif dalam budaya dan gaya hidup masyarakat. Kaum perempuan tidak lagi direndahkan dan dihinakan oleh kaum laki-laki, melainkan diberi pengakuan atas martabat dan kemuliaannya.

Islam memberikan pengakuan yang signifikan terhadap peran perempuan dalam tatanan sosial dan politik. Hak-hak politik diberikan kepada kaum perempuan, termasuk hak untuk berbicara dan mengutarakan pendapat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, tanpa membedakan gender. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Teladan dari kaum perempuan pada masa itu,



seperti Shafiyah bibi Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengikuti pertempuran. Pada periode awal kebangkitan peradaban Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, terjadi perubahan dalam struktur kekuasaan, dari sistem demokrasi menuju sistem monarki absolut. Meskipun Islam sedang mengalami kejayaan pada masa tersebut, terjadi degradasi politik dan penurunan kedudukan perempuan. Dalam konteks ini, munculnya hadits-hadits misogini menunjukkan adanya tantangan dalam mengakui peran dan hak-hak perempuan dalam representasi politik.

Representasi politik perempuan menjadi topik penting dalam konteks perkembangan politik Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang signifikan dari perempuan, partisipasi dan representasi mereka dalam ranah politik masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap peran perempuan dalam representasi politik Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mereka, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan representasi perempuan di tingkat politik. Peran perempuan dalam politik Indonesia terpengaruh oleh konteks sejarah dan budaya yang kaya dan kompleks. Meskipun perempuan memiliki hak pilih dan dipilih sejak masa kemerdekaan Indonesia, pengaruh patriarki dan norma-norma sosial masih menghalangi partisipasi politik perempuan secara signifikan. Budaya yang masih kuat menghargai peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga juga turut membatasi akses mereka ke dalam ruang politik.

Data statistik menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan dalam populasi Indonesia secara keseluruhan signifikan, proporsi mereka dalam posisi politik terpilih relatif rendah. Baik dalam parlemen maupun dalam pemerintahan lokal, perempuan seringkali diwakili dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka dalam populasi secara keseluruhan. Bahkan, tren ini cenderung stagnan atau bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Norma-norma sosial yang mengharuskan perempuan untuk memprioritaskan peran domestik mereka seringkali menjadi hambatan utama bagi partisipasi politik Perempuan (Dewi et al., 2021). Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang masih dominan. Perempuan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, keuangan, dan jaringan politik. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk terlibat dalam politik secara aktif.

Diskriminasi gender dan stereotip yang melekat pada perempuan dalam politik dapat menghalangi aspirasi politik mereka. Perempuan seringkali dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam membangun reputasi politik dan mendapatkan dukungan publik. Partai politik memiliki peran penting dalam



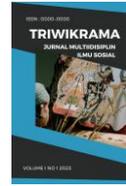
mencalonkan dan mendukung kandidat politik. Kurangnya representasi perempuan dalam struktur dan keputusan partai politik dapat mengurangi peluang mereka untuk terlibat dalam politik secara signifikan. Kampanye yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik perempuan dan pendidikan yang memperkuat keterampilan kepemimpinan perempuan sangat diperlukan (Fatin, 2022).

Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik, termasuk kuota perempuan dalam struktur politik dan insentif untuk partai politik yang mencalonkan kandidat perempuan. Peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dapat membantu mengurangi ketimpangan gender dalam politik dengan memberikan mereka kekuatan dan otonomi lebih besar. Kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik dan upaya untuk mengurangi diskriminasi gender harus menjadi prioritas. Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, representasi mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa suara perempuan terdengar dalam proses politik Indonesia.

1. Peran Politik Perempuan dalam Lintas Sejarah Indonesia

Peran politik perempuan dalam sejarah Indonesia menandai sebuah perjalanan panjang yang melibatkan perjuangan melawan budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan zaman, perempuan Indonesia telah aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik dan kemerdekaan. Artikel ini akan menjelajahi lintas sejarah peran politik perempuan Indonesia, mulai dari kondisi budaya patriarki yang mengakar, hingga peran aktif perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan pada abad ke-19 dan pergerakan-pergerakan penting di era modern. Budaya patriarki merupakan permasalahan yang melanda masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Dalam budaya patriarki, terdapat hierarki yang jelas antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap sebagai pihak superior yang memiliki hak dan kekuasaan lebih, sementara perempuan dianggap sebagai pihak inferior yang harus tunduk dan patuh (Aprilia et al., 2020). Budaya ini memberikan ruang bagi diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan, baik dalam bidang politik maupun aspek lainnya dari kehidupan.

Pada abad ke-19 sejumlah perempuan Indonesia mulai menunjukkan peran politik yang signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contohnya adalah Nyi Ageng Serang, seorang pejuang dari Banten yang turut serta dalam perang melawan penjajah Belanda. Begitu juga dengan Cut Nyak Dien dari Aceh, yang memimpin pasukan dalam melawan Belanda. Christina Martha Tiahahu, seorang pahlawan dari Maluku, juga terlibat dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Perempuan-



perempuan ini, meskipun hidup dalam masyarakat yang dipenuhi dengan budaya patriarki, mampu mengatasi hambatan tersebut dan berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa awal abad ke-20 menjadi titik balik penting dalam perjuangan perempuan di Indonesia. Pada tahun 1928, diadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta yang menjadi tonggak penting dalam gerakan perempuan Indonesia. Kongres ini menandai awal dari gerakan perempuan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik dan sosial. Salah satu tokoh penting dari masa tersebut adalah Raden Ajeng Kartini, yang dikenal karena perjuangannya dalam mendukung pendidikan bagi perempuan. Upaya-upaya ini merupakan awal dari gerakan yang lebih besar menuju kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam politik.

Di era modern perempuan Indonesia terus menunjukkan peran aktif dalam politik. Mereka terlibat dalam berbagai tingkatan politik, mulai dari partisipasi dalam pemilihan umum hingga menduduki posisi politik yang penting. Contohnya adalah Megawati Soekarnoputri, yang menjadi Presiden Indonesia pertama pada tahun 2001. Kemudian ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki Ibu Negara, Ani Yudhoyono, yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Meskipun telah terjadi perkembangan signifikan dalam peran politik perempuan di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Budaya patriarki yang masih kuat, stereotip gender, dan kendala akses terhadap pendidikan dan sumber daya politik menjadi hambatan utama. Namun, upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pelatihan dan pendidikan yang inklusif, serta advokasi untuk keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam politik (Yandy & Mustajab, 2022).

Perjalanan peran politik perempuan dalam sejarah Indonesia mencerminkan perjuangan yang luar biasa melawan budaya patriarki dan diskriminasi gender. Dari masa pra-kemerdekaan hingga era modern, perempuan Indonesia telah menunjukkan ketangguhan dan keteguhan dalam memperjuangkan hak-hak politik dan kemerdekaan. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah menuju kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam politik terus dilakukan. Dengan demikian, peran politik perempuan di Indonesia terus berkembang dan menjadi bagian integral dari perjalanan bangsa ini menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik Praktis di Indonesia

Partisipasi politik perempuan telah menjadi sorotan penting dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia. Di bawah payung hukum yang menegaskan kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan menjadi krusial dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam peran perempuan dalam partisipasi politik praktis di Indonesia,

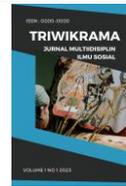


dengan fokus pada kerangka hukum yang mengatur kesetaraan gender dan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sejak era reformasi. Dalam kerangka hukum Indonesia kesetaraan gender diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 Pasal 27-34, Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993, Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), serta Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990). Melalui regulasi-regulasi ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memastikan kesetaraan hak politik antara laki-laki dan Perempuan (Amanah, 2023).

Sejak era reformasi partisipasi politik perempuan di Indonesia menjadi fokus penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif, partisipasi politik perempuan menjadi krusial dalam mewujudkan representasi yang lebih merata dan inklusif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas ruang partisipasi politik perempuan, termasuk kuota perempuan dalam pemilihan umum dan promosi kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik. Meskipun telah ada kemajuan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Budaya patriarki yang masih kuat, stereotip gender, dan kendala akses terhadap pendidikan dan sumber daya politik menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya dukungan dari partai politik dan lembaga politik lainnya juga menjadi tantangan serius dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Selain kebijakan kuota perempuan dalam pemilihan umum, juga dilakukan pendidikan dan pelatihan politik khusus untuk perempuan, promosi kesadaran akan hak-hak politik perempuan, serta advokasi untuk penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan terwujudnya partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan merata. Partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan bagian integral dari proses pembangunan demokrasi yang inklusif. Dengan landasan hukum yang mengatur kesetaraan gender dan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, Indonesia berada dalam perjalanan yang positif menuju kesetaraan gender dalam politik. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, komitmen untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memastikan keterwakilan perempuan dalam politik terus menjadi prioritas dalam pembangunan negara yang demokratis dan berkeadilan.

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi dalam suatu negara. Di Indonesia, kebijakan kuota caleg perempuan sebanyak 30% merupakan langkah penting dalam mendorong



keterlibatan perempuan dalam proses politik. Kebijakan ini telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, seperti UU No. 31 tahun 2002, UU No. 12 tahun 2003, UU No. 2 tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, dan UU No. 7 tahun 2017. Dalam tulisan ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai pentingnya kebijakan kuota caleg perempuan dalam memperkuat demokrasi Indonesia, serta dampaknya terhadap partisipasi politik Perempuan (Asiyah et al., 2021).

1. Konteks Partisipasi Politik Perempuan di Negara Berkembang

Partisipasi politik perempuan memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi. Namun, di negara-negara berkembang, tingkat partisipasi politik perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Meskipun demikian, partisipasi politik perempuan dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah kebijakan yang mendukung, seperti kebijakan kuota caleg perempuan.

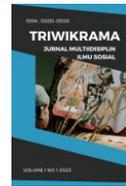
2. Konsep Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan tidak hanya terbatas pada keterlibatan langsung dalam proses politik sebagai anggota parlemen atau pejabat pemerintahan. Peran politik perempuan meliputi berbagai aktivitas, mulai dari menjadi pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, hingga anggota parlemen. Dalam konteks ini, partisipasi politik perempuan dapat terwujud baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Pentingnya Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan demokrasi dan terciptanya kebijakan yang inklusif. Perempuan membawa perspektif yang berbeda dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga dapat memastikan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta kelompok minoritas lainnya terwakili dengan baik. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam politik juga dapat mengurangi disparitas gender dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan kuota caleg perempuan merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dengan mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sejumlah caleg perempuan dalam pemilihan umum, kebijakan ini memberikan dorongan nyata bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menciptakan representasi yang lebih merata dan inklusif dalam lembaga legislatif. Implementasi kebijakan kuota caleg perempuan telah menunjukkan dampak yang positif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia (Kiftiyah, 2019). Dalam beberapa

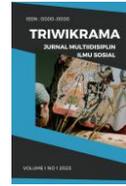


pemilihan umum terakhir, terlihat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat dan partai politik akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik.

Meskipun telah ada kemajuan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan kuota caleg perempuan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Budaya patriarki, kurangnya dukungan dari partai politik, serta kendala akses terhadap sumber daya politik menjadi beberapa tantangan utama. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini melalui pendidikan politik, advokasi, dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Kebijakan kuota caleg perempuan merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan kesetaraan gender di Indonesia. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi politik perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif. Oleh karena itu, perlu terus ada dukungan dan upaya bersama dari semua pihak untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Keterkaitan Perempuan dalam Komisioner KPU RI dan Jawa Timur

Keterlibatan perempuan dalam posisi komisioner KPU RI dan Jawa Timur menjadi sorotan penting dalam konteks partisipasi politik perempuan di Indonesia. Dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 192.770.611 orang, dan perempuan menyumbang 96.538.965 atau setara dengan 50,07 persen, keberadaan perempuan dalam KPU tidak hanya memenuhi kuota keterwakilan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan proses pemilu berlangsung dengan integritas, mandiri, profesional, dan transparan, seperti yang disampaikan oleh Evi. Namun, kendala-kendala seperti kurangnya efektivitas sosialisasi internal, pemahaman yang belum matang dari pihak partai politik, dan kurangnya persiapan personal untuk mencalonkan diri menjadi tantangan yang perlu diatasi. Solusi-solusi yang disarankan mencakup penempatan lebih banyak kader perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, intensifikasi pendidikan pemilu dan demokrasi oleh KPU sebelum hari pemilu, serta penelitian lebih lanjut dari lembaga non-pemerintah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah perempuan di bidang politik (Sumber : <https://www.kpu.go.id/>). Peneliti PUSaKO FH Unand Nisa Amerta menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif dalam keterlibatan perempuan dalam pemilu, yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu. Dia menegaskan bahwa kuota ini tidak hanya angka semata, tetapi juga mencerminkan kemampuan perempuan untuk melampaui batas tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menunjukkan peran strategis perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari sosialisasi hingga pendidikan pemilih. Keberadaan perempuan dalam peran



penyelenggara pemilu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan di institusi politik lainnya serta memberikan pengawasan terhadap suara perempuan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu bukan hanya untuk memenuhi kuota, tetapi juga sebagai upaya memastikan integritas, transparansi, dan kesetaraan dalam proses politik di Indonesia, yang menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan secara menyeluruh.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan KPU, baik di tingkat nasional maupun regional, memiliki dampak yang signifikan terhadap representasi gender dalam proses politik. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis keterkaitan perempuan dalam jabatan komisioner KPU, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi seperti Jawa Timur. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, komisioner KPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pemilihan umum, serta memastikan bahwa hak-hak pemilih dijamin dan proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada tingkat nasional partisipasi perempuan dalam jabatan komisioner KPU di Indonesia masih belum mencapai proporsi yang diharapkan. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam proses pemilihan umum, namun masih terdapat ketimpangan gender yang signifikan dalam komposisi anggota KPU. Hal ini dapat mengindikasikan masih adanya hambatan-hambatan struktural atau budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam arena politik. Di tingkat provinsi, seperti Jawa Timur, keterlibatan perempuan dalam jabatan komisioner KPU juga menjadi perhatian. Meskipun Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, namun masih terdapat kendala-kendala dalam mendorong partisipasi perempuan dalam posisi penting seperti komisioner KPU. Tantangan-tantangan ini antara lain:

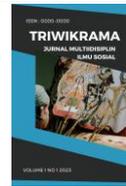
1. Norma-Norma Sosial dan Budaya

Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah Jawa Timur dapat menjadi penghalang bagi partisipasi aktif perempuan dalam politik, termasuk dalam menjadi komisioner KPU.

2. Akses Terhadap Sumber Daya

Perempuan di Jawa Timur mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan dan jaringan politik, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk maju dalam posisi politik.

3. Pemberdayaan Politik



Upaya untuk memperkuat pemberdayaan politik perempuan di Jawa Timur, termasuk melalui pelatihan, dukungan finansial, dan jaringan, dapat meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi komisioner KPU.

Namun demikian terdapat juga peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam jabatan komisioner KPU di Jawa Timur, seperti melalui kebijakan afirmatif yang memprioritaskan pencalonan perempuan dalam proses seleksi komisioner KPU. Penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik dan pemilihan umum melalui pendidikan politik yang inklusif dan terfokus. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadopsi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam politik, termasuk dalam proses seleksi komisioner KPU, untuk memastikan keterwakilan yang lebih merata. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, baik melalui perubahan kebijakan maupun perubahan sosial.

Partisipasi perempuan dalam jabatan komisioner KPU baik di tingkat nasional maupun regional seperti Jawa Timur, memiliki dampak yang signifikan terhadap representasi gender dalam proses politik dan demokrasi. Meskipun masih terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi, namun dengan langkah-langkah yang tepat, dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis seperti komisioner KPU, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penting untuk merangkum temuan dan implikasi dari analisis peran perempuan dalam representasi politik Indonesia. Partisipasi politik perempuan telah menunjukkan peran yang semakin penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Melalui berbagai upaya, termasuk kebijakan kuota caleg perempuan, perempuan Indonesia telah mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam dunia politik dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan kebijakan serta pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan dalam arena politik telah membawa perspektif yang beragam dan mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia secara lebih luas. Hal ini memperkaya proses pembuatan kebijakan dengan memastikan bahwa suara dan kebutuhan perempuan serta kelompok minoritas lainnya diakomodasi dengan baik.

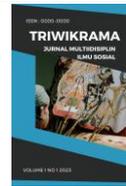
Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam memastikan keterlibatan perempuan dalam politik menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Budaya patriarki, kurangnya dukungan dari partai politik, dan kendala akses terhadap sumber daya politik masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

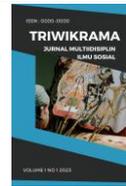
Volume 03, Number 04, 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



pihak, baik pemerintah, lembaga legislatif, partai politik, maupun masyarakat secara luas, untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju sebagai negara demokratis yang inklusif dan berkeadilan, di mana suara dan aspirasi semua warga negara, termasuk perempuan, didengar dan dihargai dalam proses politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, D. A. (2023). DINAMIKA PERAN PEREMPUAN SUNDA DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK ERA MODERN. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 410–430.
- Amareta Kristina. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 01–15. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.562>
- Aprilia, B., Maria Surya, F., & Svarna Pertiwi, M. (2020). Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>
- Asiyah, A., Astuti, A., & Nuraini, N. (2021). Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>
- Azhari, J., Virgiana, B., & Devi, P. (2022). Representasi Peran Perempuan dalam Keluarga (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Film Ali & Rat- Ratu Queens). *Jurnal Massa*, 03(01), 81–90. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/JM/article/download/1460/1032>
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23–33. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>
- Dewi, D. C., Utami, V. Y., & Yusuf, S. Y. M. (2021). Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(2), 1–12.
- Fatin, N. (2022). Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan di Indonesia. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 159–170.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>
- Nurchaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108–116.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Yandy, E. T., & Mustajab, M. (2022). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 83–92. <https://doi.org/10.30631/62.83-92>

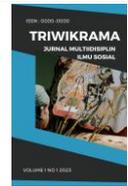
Sumber Website :

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 03, Number 04, 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10267/pentingnya-keterwakilan-perempuan-dalam-pemilihan-2024>